

DIREKTORAT JENDERAL  
STRATEGI PERTAHANAN KEMHAN  
DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN



**OPTIMALISASI PENGELOLAAN  
12 PULAU – PULAU KECIL TERLUAR YANG BERBATASAN  
DENGAN NEGARA TETANGGA GUNA MEMPERKUAT BATAS MARITIM NKRI**

PETA POSISI 12 PULAU – PULAU KECIL TERLUAR



JAKARTA, MEI 2010

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN  
12 PULAU – PULAU KECIL TERLUAR YANG BERBATASAN  
DENGAN NEGARA TETANGGA GUNA MEMPERKUAT BATAS MARITIM NKRI**

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri 17.508 gugusan pulau mempunyai tiga perbatasan darat serta 10 perbatasan maritim dengan negara tetangga. Dari 17.508 pulau terdapat 92 pulau kecil yang berhadapan langsung dengan negara tetangga serta 12 pulau kecil diantaranya ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengelolaan, karena mempunyai nilai yang sangat strategis dari sisi pertahanan keamanan dan kekayaan sumber daya alam. 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terdiri dari, Pulau Rondo di NAD, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa dan Sekatung di Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Brass di Papua, serta Pulau Dana dan Batek di Nusa Tenggara Timur. Perpres No. 78 Th 2005 merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap perlunya pengelolaan PPKT untuk menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Pulau-pulau kecil tersebut mengemban misi politis yang sangat penting bagi negara, dimana di kawasan tersebut terdapat Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR) sebagai penentuan batas kedaulatan dan yuridiksi perairan Indonesia. Disisi lain lokasi yang berada di perbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan kawasan tersebut sangat strategis dari aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Permasalahan yang terjadi di PKKT saat ini diantaranya adalah : (1) keterisolasian letak yang jauh dari pemerintahan serta keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi menuju pulau-pulau itu, (2) potensi ekonomi utama ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimum (3) tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah sebagai akibat dari tingkat pendidikan penduduk (4) ketergantungan kebutuhan sehari-hari dengan negara tetangga (5) sering terjadi berbagai kegiatan *illegal fishing*, jalur *illegal logging*, *illegal trading* dan *illegal trafficking*.

Pengelolaan pulau - pulau kecil terluar, harus dapat memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan khusus dalam pengelolaan 12 PPKT melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara terus menerus agar keberadaannya dapat

dipertahankan dan otomatis akan dapat menjaga keutuhan NKRI. Konsep kebijakan pengelolaan dan pengembangan 12 PPKT sebagai berikut :

“ Terwujudnya peningkatan pengelolaan PPKT melalui peningkatan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan jasa lingkungan secara optimal dan lestari, pengembangan, pengembangan dan penataan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, peningkatan kualitas SDM dan pengendalian peyebaran penduduk, peningkatan pertahanan dan keamanan, penataan peraturan perundang-undangan pengelolaan PPKT, terwujudnya penetapan dan pemeliharaan batas wilayah perbatasan, guna memantapkan stabilitas nasional untuk mewujudkan keutuhan NKRI “.

Selanjutnya kebijakan itu akan diterjemahkan dalam strategi-strategi yang kemudian direalisasikan dalam berbagai langkah upaya-upaya dilapangan.